JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING
Vol. {10}, No. {2}, {2026}, {422-437}
ISSN: {2548-9917} (online version)

Article History
Received {September, 2026}
Accepted {October, 2026}

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KOTA MAKASSAR

Warda Yusnita Faisal[1)*], Azwar Anwar[2)] Warka Syachbrani[3)]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar email: wardayusnit4@gmail.com
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar email: azwar_anwar@unm.ac.id
[3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar email: warka.syachbrani@unm.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the financial performance of the Makassar City Government for the 2022–2024 period using contribution, effectiveness, efficiency, and growth ratios. Data are sourced from the Budget Realization Report (LRA) through the Regional Financial Information System (SIKD) using a descriptive quantitative method based on ratio analysis to assess fiscal independence, revenue achievement, spending efficiency, and the development of Regional Original Revenue (PAD). The results of the study indicate that the contribution of PAD to the total revenue of Makassar City is still low with an average of 38.73%, thus reflecting a high dependence on transfer revenue, while the effectiveness ratio which decreased with an average of 76.68% is classified as less effective and the efficiency ratio of 103.92% indicates that regional spending is not yet efficient; in addition, the fluctuating PAD growth ratio with an average of 6.3% indicates unstable growth, so that overall the financial performance of Makassar City still faces challenges in increasing the effectiveness and growth of PAD, controlling regional spending, and strengthening fiscal independence through strengthening revenue management strategies, optimizing PAD potential, and improving budget planning and supervision so that regional financial management is more effective, efficient, and sustainable

Keywords: *Contribution, Effectiveness, Efficiency, Financial Performance, Growth*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar periode 2022–2024 menggunakan rasio kontribusi, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Data bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan metode deskriptif kuantitatif berbasis analisis rasio untuk menilai kemandirian fiskal, pencapaian pendapatan, efisiensi belanja, dan perkembangan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kota Makassar masih rendah dengan rata-rata 38,73% sehingga mencerminkan tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer. Rasio efektivitas yang menurun dengan rata-rata 76,68% tergolong kurang efektif, sedangkan rasio efisiensi sebesar 103,92% menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah belum efisien. Selain itu, rasio pertumbuhan PAD yang berfluktuasi dengan rata-rata 6,3% mengindikasikan pertumbuhan yang belum stabil. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Pemerintah Kota Makassar masih perlu diperkuat melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, peningkatan efektivitas pemungutan pendapatan, serta pengendalian belanja daerah yang lebih terukur. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: Kontribusi, Efisiensi, Kinerja Keuangan, Kontribusi Pertumbuhan

1. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan adalah ukuran penting untuk menilai kemampuan entitas dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan adalah kemampuan suatu entitas dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan serta menjaga stabilitas keuangannya. Pada pemerintah daerah, kinerja keuangan menunjukkan kemampuan mengoptimalkan pendapatan, mengendalikan belanja, serta menjaga stabilitas fiskal. Selain sebagai alat evaluasi, kinerja keuangan juga menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis dan bentuk pertanggungjawaban anggaran secara transparan serta akuntabel (Oktaviani, 2025).

*Corresponding author. E-mail: wardayusnit4@gmail.com

Melalui penyediaan informasi dan keterbukaan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk berperan sebagai pihak yang menyajikan data terkait aktivitas serta kinerja keuangan secara akurat, relevan, konsisten, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Transparansi dalam pelaporan kinerja keuangan ini dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat, yaitu hak untuk memperoleh informasi, hak agar aspirasinya diperhatikan, hak memperoleh penjelasan, serta hak untuk menuntut pertanggungjawaban (Syachbrani, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi ukuran kemandirian serta kapasitas pembangunan daerah pada era otonomi. Namun, banyak daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan PAD dan menyeimbangkan struktur belanja karena tingginya ketergantungan pada transfer pusat. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan evaluasi mendalam melalui analisis kinerja yang tepat agar efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola anggaran dapat terukur, sehingga kajian akademik tentang kinerja keuangan daerah menjadi semakin relevan dilakukan (Sahdan, 2024).

Penelitian sebelumnya telah menyoroti persoalan kinerja keuangan pemerintah daerah di berbagai wilayah, termasuk Kota Makassar. Hasil penelitian Lutfi, Wahyuni, & Hamris (2025) menunjukkan bahwa Kota Makassar masih bergantung pada dana transfer pusat dengan tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan yang belum optimal. Penelitian Yuniza & Suhartini (2022) menemukan bahwa komitmen organisasi dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, namun pengaruhnya masih terbatas karena lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola keuangan. Sementara itu, penelitian Ningrat (2025) mengungkapkan bahwa meskipun realisasi anggaran Kota Makassar tergolong tinggi, efektivitas pengelolaannya belum maksimal akibat ketimpangan fiskal dan penurunan alokasi belanja produktif. Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa kinerja keuangan Kota Makassar masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal, efisiensi anggaran, dan pemerataan pengelolaan keuangan daerah.

Kota Makassar di Sulawesi Selatan mengalami dinamika serupa dengan banyak daerah lain. Pada periode 2022–2024, pemerintah daerah berfokus pada peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja publik. Walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren kenaikan setiap tahun, pemanfaatannya belum maksimal karena sebagian besar anggaran masih terserap pada belanja operasional, sementara alokasi belanja modal untuk pembangunan jangka panjang belum mengalami peningkatan berarti. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara rencana dan realisasi anggaran. Jika hal ini berlanjut, kualitas layanan publik berisiko terhambat. Lemahnya pergeseran dari belanja rutin ke belanja produktif menunjukkan perlunya evaluasi mendalam melalui penelitian yang dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan daerah (Ningrat, 2025).

Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (dalam jutaan rupiah)		Kontribusi PAD (%)
	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	
2022	3.587.330	1.410.810	39,33
2023	3.739.000	1.454.240	38,89
2024	4.204.810	1.605.020	38,18

Sumber: Portal Data SIKD Makassar- Kemenkeu (2025)

Berdasarkan ringkasan Tabel 1, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar terhadap total pendapatan daerah mengalami fluktuasi selama periode 2022–2024. Meskipun secara nominal PAD terus meningkat setiap

tahun, persentase kontribusinya terhadap total pendapatan daerah relatif stagnan di kisaran 38–39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah lebih banyak didorong oleh sumber-sumber lain, seperti dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Makassar masih tergolong moderat dan ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, efisiensi pengelolaan aset daerah, dan pengembangan sektor potensial yang berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kinerja keuangan daerah, khususnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencerminkan tingkat kemandirian fiskal Kota Makassar. Periode 2022–2024 dipilih karena menunjukkan fluktuasi kontribusi PAD di tengah peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas secara spesifik mengenai kontribusi PAD terhadap total pendapatan di Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan (Lutfi, 2025).

Apabila kinerja keuangan tidak dikelola dengan optimal, risiko inefisiensi dan ketergantungan pada dana transfer akan tetap tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar melalui analisis rasio kontribusi, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal yang tepat. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan pengelolaan keuangan serta memberikan masukan strategis untuk meningkatkan kemandirian dan stabilitas fiskal daerah (Lutfi, 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar periode melalui rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keuangan daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menjadi dasar evaluasi kebijakan fiskal. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan mendukung kebijakan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan berkelanjutan (Iskandar, 2023).

2. KAJIAN LITERATUR

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah guna kelangsungan pembangunan daerah masing-masing. Terdapat dua dampak khusus bagi pemerintah daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah, yakni selain efisiensi dan efektivitas juga biaya ekonomi yang semakin meningkat (Mikesell, 2014). Dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia, asas desentralisasi digunakan agar daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Kondisi ini menjadikan setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan dan pengelolaan belanja yang tepat (Nasir, 2023).

Kinerja keuangan daerah pada dasarnya menggambarkan sejauh mana pengelolaan keuangan mampu mendukung pelaksanaan program, kebijakan, serta kegiatan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah (Bahl, 2003). Untuk menilainya, digunakan metode pengukuran yang mengombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan dengan analisis rasio keuangan. Analisis ini berfungsi untuk melihat efektivitas, efisiensi, serta tingkat kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya (Sadat, 2022).

Kinerja keuangan merupakan analisis untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Penilaian ini mencerminkan kondisi keuangan daerah dalam suatu periode, apakah berada pada kategori baik atau kurang baik, serta bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya berjalan efektif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan (Sholehah,

2023).

Melalui pengukuran tersebut, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Hasil evaluasi kinerja keuangan juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan pengambilan kebijakan di masa mendatang. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah (Salasa, 2024).

Kinerja keuangan mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu, mencakup kemampuan memperoleh dan menggunakan dana. Penilaian dilakukan melalui indikator seperti rasio efisiensi, efektivitas, dan kemandirian keuangan yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban dan mengelola pendapatan. Evaluasi ini penting bagi pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan serta bagi pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Mahmudi, 2019).

Kinerja keuangan daerah menilai efektivitas pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara optimal. Konsistensi pengelolaan keuangan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan stabilitas dan transparansi (Devas, 2003). Hal ini tercermin dalam laporan keuangan berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan lembaga pengawas, sekaligus menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan serta menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah (Marwah, 2024).

Berdasarkan berbagai definisi kinerja keuangan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil pencapaian pemerintah daerah dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan keuangan daerah melalui indikator seperti efisiensi, efektivitas, dan kemandirian keuangan. (Shah, 2010). Penilaian ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk melakukan evaluasi serta menentukan kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah (Sholehah, 2023).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Perumusan serta perkembangan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang kuat dengan upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pengelolaan keuangan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat merupakan bentuk penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, aturan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan 425ublic secara optimal. (Zhang, 2017). Keadaan tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap keuangan negara maupun dana yang diperuntukkan bagi masyarakat (Iskandar, 2023).

Indeks pengelolaan keuangan daerah merupakan ukuran untuk menilai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan dalam pengelolaan keuangan pada periode tertentu (Oates, 2010). Pengelolaan keuangan daerah membantu pengguna laporan memahami kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, menilai kinerja masa lalu, serta memperkirakan potensi kinerja di masa depan dengan mengidentifikasi karakteristik keuangan berdasarkan laporan yang tersedia (Hartato, 2022).

Pengelolaan keuangan daerah dapat dievaluasi melalui analisis terhadap laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Analisis ini meninjau bagaimana anggaran dimanfaatkan selama satu periode tertentu dengan memperhatikan besaran dana yang digunakan serta kualitas hasil yang dicapai (Ingram, 2016). Selain itu, analisis tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien (Darmadi, 2021).

Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak sebatas melihat pencapaian realisasi anggaran, melainkan juga memperhatikan tingkat efisiensi pemanfaatan dana serta dampak yang diterima masyarakat dari hasil pembangunan (Minassian, 2010). Penyajian

laporan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan membantu pemerintah daerah melakukan penilaian secara tepat guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran. Kajian tersebut menjadi dasar penting untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang selaras dengan prinsip serta standar akuntansi pemerintahan (Putri, 2023).

Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Analisis keuangan merupakan kegiatan mengidentifikasi kriteria keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Pada LKPD, analisis ini dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan antarperiode atau dengan daerah lain untuk melihat perbandingan posisi keuangan (Mahmudi, 2019).

Beberapa rasio yang dapat digunakan antara lain Rasio kontribusi menggambarkan besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam suatu periode anggaran. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerahnya sendiri dibandingkan dengan seluruh pendapatan yang diterima (Mahmudi, 2019).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan realisasi rill daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan dalam anggaran (Mahmudi, 2019).

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menjelaskan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang sebenarnya diterima (Rodríguez, 2022). Rasio ini berfungsi untuk mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada guna memperoleh pendapatan maupun memberikan pelayanan publik secara optimal (Mahmudi, 2019).

Rasio pertumbuhan digunakan sebagai alat untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan serta pengeluaran setiap periode (Amin, 2019). Pengukuran melalui rasio ini dilakukan untuk melihat arah perkembangan kinerja keuangan daerah dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat diketahui apakah kondisi keuangan mengalami kemajuan, penurunan, atau tidak mengalami perubahan yang signifikan pada unsur keuangan yang diteliti (Rasimah, 2021).

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Daerah

Perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia terus berlangsung seiring kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah yang menerapkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan cenderung memperoleh kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. (Smoke, 2015). Prinsip transparansi berkaitan dengan kemudahan akses informasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memperoleh data yang berhubungan dengan kepentingan umum secara terbuka (Nurkamto, 2018).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanat untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principle) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Martinez, 2018). Diharapkan dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah (Sari, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin melalui penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Transparansi menjamin keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengakses data publik, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan

anggaran secara jelas kepada pihak berwenang dan masyarakat (Setyadi, 2019).

Perubahan Regulasi dan Kebijakan Fiskal

Perubahan regulasi keuangan daerah di Indonesia membawa pengaruh penting terhadap arah dan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi dasar pembaruan sistem hubungan fiskal antara pusat dan daerah. Regulasi ini mengatur mekanisme pendanaan dengan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia (Amin, 2024).

Arah kebijakan fiskal daerah menekankan peningkatan kapasitas fiskal serta penyesuaian kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional (Krebs 2020). Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan publik diarahkan untuk mencapai efisiensi pemanfaatan sumber daya melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas pemungutan pajak, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Setiap penggunaan anggaran harus berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sedangkan pengukuran kinerja sektor publik perlu menitikberatkan pada hasil (outcome) sebagai wujud efektivitas dan tanggung jawab keuangan daerah (Hartato, 2022).

Perubahan regulasi dan kebijakan fiskal secara keseluruhan menunjukkan arah penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil. Penerapan anggaran berbasis kinerja menuntut pengelolaan keuangan yang berorientasi pada capaian kinerja (Faguet, 2021). Tata kelola keuangan yang baik harus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan (Halim, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif yang berfokus pada pengkajian kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar selama periode 2022–2024. Data penelitian bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Makassar yang diperoleh melalui situs resmi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kota Makassar.

Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil perhitungan rasio keuangan, tetapi juga berusaha memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan keuangan daerah. Analisis dilakukan melalui deskripsi dan interpretasi data yang diperoleh, kemudian dikaitkan dengan kondisi internal pemerintah daerah serta faktor eksternal seperti kebijakan fiskal, dinamika. ekonomi, dan perubahan regulasi yang berlaku.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Makassar yang memuat data pendapatan dan belanja daerah untuk periode 2022–2024. Sampel penelitian ditetapkan menggunakan metode sampling jenuh (total sampling), sehingga seluruh populasi dijadikan sampel, yaitu dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama tiga tahun berturut-turut. Data penelitian diperoleh melalui website resmi Pemerintah Kota Makassar dan portal data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan Pemerintah Kota Makassar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan penelusuran data pada website resmi pemerintah. Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Makassar tahun 2022–2024 yang diperoleh dari sumber resmi pemerintah daerah, seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), serta melalui portal data Kementerian Keuangan. Data tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis rasio keuangan yang mencakup rasio kontribusi, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Selain itu,

penelusuran website resmi pemerintah dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan terkait kebijakan fiskal, capaian pendapatan, dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga diperkuat dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan kebijakan, dan buku-buku relevan, guna memperkuat landasan teori serta memberikan konteks ilmiah dalam menganalisis hasil penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan bantuan analisis rasio keuangan. Data yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran Kota Makassar tahun 2022–2024 dianalisis untuk menghitung rasio kontribusi, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Hasil perhitungan tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menilai sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode penelitian. Selanjutnya, tren dari tiap rasio dibandingkan antar tahun guna melihat perkembangan serta kecenderungan kinerja keuangan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Makassar dalam penelitian ini merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat pencapaian pengelolaan pendapatan dan belanja daerah selama periode 2022–2024. Salah satu rasio yang menjadi fokus utama adalah Rasio Kontribusi, yang digunakan untuk menilai peranan masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah. Selain itu, peneliti juga menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Pertumbuhan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Pemerintah Kota Makassar yang diperoleh dari dokumen resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Berdasarkan data tersebut, peneliti dapat menilai kinerja keuangan daerah selama tiga tahun anggaran, sekaligus membandingkan hasil rasio dengan standar analisis keuangan pemerintah daerah guna memperkuat interpretasi penelitian. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah:

Rasio Kontribusi (Kemandirian)

Rasio kontribusi keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintah. Rasio kontribusi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{1{,}410.813.774.025}{3.587.333.930.242} \text{ x } 100\%$$

$$= 39\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.568.267.701.812}{4{,}049.377.501.945} \text{ x } 100\%$$

$$= 39\%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{1.605.016.943.364}{4.204.813.238.565} \text{ x } 100\%$$

$$= 38\%$$

Besarnya rasio kontribusi PAD terhadap pendapatan Kota Makassar tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rasio Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2022-2024

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio Kontribusi	Kemampuan Keuangan
2022	1.410.813.774.025	3.587.333.930.242	39,33%	Sangat Kurang
2023	1.568.267.701.812	4.049.377.501.945	38,73%	Sangat Kurang
2024	1.605.016.943.364	4.208.813.238.565	38,13%	Sangat Kurang
Rata-rata			38,73%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah (2026)

Besarnya rasio kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan Kota Makassar pada tahun 2022 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data, terlihat bahwa rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kota Makassar mengalami penurunan tipis dari 39,33% pada tahun 2022 menjadi 38,13% pada tahun 2024, dengan rata-rata sebesar 38,73%. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih belum optimal, mengingat menurut Halim (2020) rasio kemandirian PAD dikategorikan memadai apabila mencapai minimal 40%, sedangkan nilai di bawah batas tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Dari nilai rasio kontribusi tersebut, dapat dikategorikan bahwa kemampuan keuangan Kota Makassar dalam periode 2022–2024 tergolong sangat kurang, yang menunjukkan ketergantungan kota ini terhadap sumber pendapatan lain di luar PAD.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan realisasi rill daerah. Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \text{ x } 100\%$$

Perhitungan rasio efektivitas pengelolaan keuaangan daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022-2024 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2022 $= \frac{1.410.813.774.025}{1.715.032.322.000} \text{ x } 100\%$
$= 82{,}26\%$

Tahun 2023 $= \frac{1.568.267.701.812}{1.965.695.699.807} \; x \; 100\%$
$= 79{,}78\%$

Tahun 2024 $= \frac{2.169.105.947.548}{1.605.016.943.364} \; x \; 100\%$
$= 73.99\%$

Besarnya rasio efektivitas PAD terhadap pendapatan Kota Makassar tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rasio Efektivitas Daerah Kota Makassar Tahun 2022-2024

Tahun	Reaslisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2022	1.410.813.774.025	1.715.032.322.000	82,26%	Kurang Efektif
2023	1.568.267.701.812	1.965.695.699.807	79,78%	Kurang Efektif
2024	2.169.105.947.548	1.605.016.943.364	73,99%	Tidak Efektif
Rata-rata			38,73%	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah (2026)

Dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama 3 tahun terakhir, terlihat tren penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas, terlihat adanya tren penurunan dari 82,26% pada tahun 2022 dan 79,78% pada tahun 2023 yang sama-sama tergolong kurang efektif hingga menjadi 73,99% pada tahun 2024 yang masuk dalam kriteria tidak efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD belum optimal dibandingkan target yang ditetapkan karena belum mencapai batas efektivitas minimal 90% sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2019).

Secara keseluruhan, rata-rata rasio efektivitas PAD Kota Makassar selama 3 tahun tersebut sebesar 76,68%, menunjukkan bahwa realisasi PAD masih belum sepenuhnya optimal dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah untuk mendukung kemampuan keuangan Kota Makassar.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menjelaskan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang sebenarnya diterima. Rumus yang digunakan adalah

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Perhitungan rasio efisiensi pengelolaan keuaangan daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022-2024 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2022 $= \frac{3.549.062.984.209}{3.587.333.930.242}\ x\ 100\%$
$= 98{,}93\%$

Tahun 2023 $= \frac{4.507.727.571.970}{4.049.377.501.945}\ x\ 100\%$
$= 111{,}32\%$

Tahun 2024 $= \frac{4.268.799.980.997}{4.204.813.238.565}\ x\ 100\%$
$= 101{,}52\%$

Besarnya rasio efisiensi terhadap pendapatan Kota Makassar tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Rasio Efisiensi Daerah Kota Makassar Tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria
2022	3.549.062.984.209	3.587.333.930.242	98,93%	Kurang Efisien
2023	4.507.727.571.970	4.049.377.501.945	111,32%	Tidak Efisien
2024	5.291.666.294.721	4.997.480.596.068	101,52%	Tidak Efisien
Rata-rata			103,92%	Tidak Efisien

Sumber: Data Diolah (2026)

Sebuah daerah dikatakan efisien dalam pemanfaatan pendapatannya jika rasio efisiensi mencapai 100% atau kurang, yang menandakan bahwa belanja daerah tidak melebihi kemampuan pendapatan yang tersedia. Dengan kata lain, semakin rendah rasio efisiensi dibandingkan 100%, semakin efisien penggunaan pendapatan daerah tersebut.

Besarnya rasio efisiensi belanja daerah Kota Makassar selama periode 2022 hingga 2024, rasio efisiensi belanja daerah menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan nilai yang melebihi 100 persen, yaitu sebesar 98,93% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 111,32% pada tahun 2023, dan menurun menjadi 101,52% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah Kota Makassar masih belum efisien, mengingat menurut Halim (2020) rasio efisiensi dikategorikan efisien apabila berada di bawah 100 persen, sedangkan nilai di atas batas tersebut mencerminkan bahwa belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang tersedia.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio efisiensi belanja daerah Kota Makassar selama 3 tahun sebesar 103,92%, menunjukkan bahwa realisasi belanja cenderung melebihi kemampuan pendapatan daerah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengelolaan belanja yang lebih berhati-hati dan perencanaan anggaran yang lebih realistis untuk mendukung keberlanjutan keuangan Kota Makassar.

Rasio Pertumbuhan

Analisis rasio pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui tren perkembangan kinerja keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat dievaluasi apakah terjadi peningkatan, penurunan, atau stagnasi pada komponen keuangan yang dianalisis. Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{Realisasi\ Tahun\ Berjalan - Realisasi\ Tahun\ Sebelumnya}{Realisasi\ Tahun\ Sebelumnya}\ x\ 100\%$$

Perhitungan rasio pertumbuhan pengelolaan keuaangan daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022-2024 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2022 $= \frac{3.587.333.930.242 - 3.286.048.497.393}{3.286.048.497.393}\ x\ 100\%$
$= 9{,}17\%$

Tahun 2023 $= \frac{4.049.377.501.945 - 3.587.333.930.242}{3.587.333.930.242}\ x\ 100\%$
$= 12{,}88\%$

Tahun 2024 $= \frac{4.204.813.238.565 - .049.377.501.945}{4.049.377.501.945}\ x\ 100\%$
$= 3{,}84\%$

Besarnya rasio pertumbuhan PAD Kota Makassar tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Daerah Kota Makassar Tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi (PAD)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Kriteria Pertumbuhan
2022	1.410.813.774.025	9,17%	Sedang
2023	1.568.267.701.812	12,88%	Tinggi
2024	1.605.016.943.364	3,84%	Sedang
	Rata-rata	8,63%	Sedang

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil perhitungan, realisasi PAD menunjukkan fluktuasi dengan pergerakan nilai yang naik turun, di mana pada tahun 2022 pertumbuhan PAD berada pada kategori sedang, meningkat signifikan pada tahun 2023 hingga masuk kategori tinggi, namun kembali menurun pada tahun 2024 dan berada pada kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Makassar belum konsisten, meskipun menurut Mahmudi (2019) rasio pertumbuhan PAD dinilai baik apabila bernilai lebih besar dari 0 persen, sedangkan nilai nol atau negatif mencerminkan tidak adanya peningkatan pendapatan daerah dibandingkan periode sebelumnya.

Fluktuasi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya konsisten dalam meningkatkan kinerja penerimaan PAD. Kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2023 menunjukkan adanya upaya intensifikasi atau ekstensifikasi pendapatan yang berjalan efektif, namun penurunan pada tahun berikutnya menandakan perlunya strategi yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan PAD selama periode 2022–2024 menunjukkan kecenderungan yang belum stabil, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber PAD agar pertumbuhan dapat lebih terjaga di tahun-tahun berikutnya.

Pembahasan

Kontribusi (Kemandirian)

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi PAD Kota Makassar tahun 2022–2024, terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami penurunan dari 39,33% pada tahun 2022 menjadi 38,13% pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi sebesar 38,73% menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih berada pada kategori sangat kurang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Makassar masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya melalui PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lutfi dkk. (2025) yang menemukan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Makassar masih relatif rendah karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah belum mampu mendominasi struktur penerimaan daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana transfer masih menjadi sumber pendapatan utama sehingga kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mandiri. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Ningrat (2025) yang menyatakan bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Makassar belum optimal, terutama pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini mendukung temuan Sutriani dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian akuntansi dan penerapan prinsip value for money. Rendahnya kontribusi PAD dapat menjadi indikasi bahwa pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah belum dilakukan secara optimal sehingga potensi penerimaan yang tersedia belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Penelitian Dewi (2023) juga menunjukkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, rendahnya kontribusi PAD dapat dikaitkan dengan masih perlunya penguatan sistem pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah tercermin dari kemampuan daerah tersebut dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Sebaliknya, kontribusi PAD yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PAD dalam struktur pendapatan Kota Makassar masih belum optimal. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah memerlukan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, memperbaiki tata kelola pemungutan pajak dan retribusi, mengembangkan inovasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Tingkat Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kota Makassar tahun 2022–2024, terlihat bahwa tingkat efektivitas PAD mengalami penurunan dari 82,26% pada tahun 2022 menjadi 73,99% pada tahun 2024. Rata-rata rasio efektivitas sebesar 76,68% menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan PAD berada pada kategori kurang efektif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan masih perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lutfi dkk. (2025) yang menemukan bahwa efektivitas PAD Kota Makassar belum menunjukkan kinerja yang optimal karena realisasi pendapatan daerah masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pencapaian target PAD dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi pendapatan serta efektivitas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Ningrat (2025), yang menyatakan bahwa pengelolaan pendapatan daerah Kota Makassar masih menghadapi berbagai kendala sehingga realisasi pendapatan belum mampu mencapai target secara maksimal.

Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, hasil penelitian ini mendukung temuan Sutriani dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja dan prinsip value for money berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas serta pencapaian kinerja organisasi sektor publik. Penurunan efektivitas PAD yang terjadi selama periode penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan target pendapatan, pelaksanaan pemungutan, serta evaluasi kinerja penerimaan daerah masih memerlukan perbaikan agar target yang ditetapkan lebih realistis dan dapat dicapai secara optimal.

Selain itu, penelitian Dewi (2023) menunjukkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Rendahnya efektivitas PAD dalam penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pemungutan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, potensi penerimaan daerah yang tersedia belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori efektivitas keuangan daerah yang menyatakan bahwa efektivitas PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Sebaliknya, rasio efektivitas yang rendah menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi

pendapatan yang dapat menghambat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD Kota Makassar masih belum optimal dan cenderung mengalami penurunan selama periode 2022–2024. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan daerah masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, meningkatkan akurasi penetapan target pendapatan, memanfaatkan teknologi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi agar realisasi PAD dapat lebih mendekati target yang ditetapkan dan mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kota Makassar tahun 2022–2024, terlihat bahwa tingkat efisiensi cenderung berada pada kategori kurang efisien hingga tidak efisien. Rasio efisiensi tercatat sebesar 98,93% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 111,32% pada tahun 2023 dan berada pada angka 101,52% pada tahun 2024. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 103,92% menunjukkan bahwa pengeluaran daerah relatif lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja daerah belum dilakukan secara optimal sehingga efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ningrat (2025) yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah Kota Makassar masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Penelitian tersebut menemukan bahwa proporsi belanja operasional yang relatif tinggi dibandingkan belanja produktif menyebabkan efektivitas penggunaan anggaran menjadi kurang optimal. Akibatnya, peningkatan belanja tidak selalu diikuti oleh peningkatan kapasitas fiskal daerah maupun kualitas pelayanan publik yang dihasilkan.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Lutfi dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Kota Makassar masih menghadapi permasalahan dalam aspek efisiensi karena terdapat ketidakseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja pemerintah daerah. Tingginya rasio efisiensi menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya keuangan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin sehingga ruang fiskal untuk kegiatan pembangunan dan investasi daerah menjadi lebih terbatas.

Dari perspektif tata kelola sektor publik, hasil penelitian ini mendukung temuan Sutriani dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa pengendalian akuntansi dan penerapan prinsip value for money berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik. Prinsip value for money menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Rasio efisiensi yang berada di atas 100% selama dua tahun berturut-turut menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar.

Selain itu, penelitian Dewi (2023) menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Ketidakefisienan belanja yang ditemukan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa proses pengawasan, evaluasi program, dan pengendalian realisasi anggaran masih perlu diperkuat agar penggunaan anggaran lebih terarah pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk meminimalkan pemborosan anggaran dan memastikan setiap pengeluaran memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori value for money yang menyatakan bahwa efisiensi merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam menghasilkan output tertentu dengan penggunaan sumber daya yang minimal atau penggunaan sumber daya yang

tersedia secara optimal. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan daerah karena menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengendalikan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, rasio efisiensi yang tinggi mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan relatif besar dibandingkan hasil yang diperoleh.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja efisiensi keuangan Pemerintah Kota Makassar selama periode 2022–2024 masih belum optimal. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, mengendalikan pertumbuhan belanja operasional, serta mengoptimalkan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan PAD Kota Makassar selama tahun 2022–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi, yaitu sebesar 9,17% pada tahun 2022, meningkat menjadi 12,88% pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 3,84% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD belum berlangsung secara stabil dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Lutfi dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kinerja PAD Kota Makassar masih berfluktuasi dan dipengaruhi oleh kontribusi beberapa sektor pendapatan utama. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Ningrat (2025) yang menjelaskan bahwa ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu menyebabkan pertumbuhan PAD sulit dipertahankan secara konsisten.

Selain itu, Sutriani dkk. (2023) menegaskan bahwa penerapan akuntabilitas, pengendalian akuntansi, dan prinsip value for money berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sementara itu, Dewi (2023) menemukan bahwa pengawasan yang efektif dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Fluktuasi pertumbuhan PAD dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar belum mampu menjaga konsistensi pertumbuhan PAD setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih berkelanjutan melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD agar pertumbuhan pendapatan daerah dapat lebih stabil pada periode berikutnya.

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar periode 2022–2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang berdampak pada kontribusi, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan PAD. Analisis faktor-faktor tersebut penting untuk menjelaskan perubahan kinerja keuangan yang terjadi selama periode penelitian.

Secara internal, rendahnya kontribusi dan efektivitas PAD menunjukkan bahwa optimalisasi sumber pendapatan daerah masih menghadapi berbagai kendala. Temuan ini sejalan dengan Ningrat (2025) yang menyatakan bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Makassar belum optimal akibat belum maksimalnya pemanfaatan potensi PAD. Selain itu, Lutfi dkk. (2025) juga menemukan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Makassar masih relatif rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi.

Dari sisi efisiensi, tingginya rasio efisiensi mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja daerah belum optimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi (2023) yang menegaskan bahwa pengawasan dan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, Sutriani dkk. (2023)

menjelaskan bahwa pengendalian akuntansi dan penerapan prinsip value for money berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien.

Secara eksternal, fluktuasi pertumbuhan PAD dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, aktivitas dunia usaha, serta perubahan kebijakan fiskal yang berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi daerah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan PAD Kota Makassar belum stabil dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, peningkatan kinerja keuangan daerah memerlukan optimalisasi PAD, penguatan pengawasan anggaran, serta penyesuaian kebijakan yang mampu merespons perubahan kondisi ekonomi secara efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berada pada kategori sangat rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan PAD dalam mendukung pendapatan daerah masih lemah, sehingga tingkat kemandirian fiskal Kota Makassar tetap sangat terbatas. Situasi ini mengindikasikan perlunya upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap pendapatan eksternal dapat berkurang. Tingkat efektivitas PAD berada pada kategori kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan belum mampu memenuhi target yang ditetapkan, sehingga dibutuhkan peningkatan strategi dan pengelolaan PAD agar hasil yang dicapai lebih optimal. Keadaan tersebut juga menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Tingkat pertumbuhan PAD berada pada kategori pertumbuhan sedang hingga tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PAD mengalami peningkatan, laju pertumbuhannya belum stabil dan masih dipengaruhi oleh dinamika ekonomi daerah. Hal ini menegaskan perlunya upaya penguatan basis pendapatan agar pertumbuhan PAD dapat berlangsung lebih konsisten dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kota Makassar menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal masih rendah, realisasi PAD belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal, serta pengelolaan belanja daerah belum efisien, meskipun pertumbuhan PAD relatif cukup baik namun belum menunjukkan kestabilan. Berdasarkan evaluasi tersebut, kinerja keuangan Kota Makassar secara umum belum dapat dikategorikan baik, sehingga masih diperlukan penguatan kapasitas pendapatan daerah, peningkatan efektivitas pemungutan PAD, serta pengendalian belanja daerah secara berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi keterbatasan, seperti pemungutan PAD yang belum optimal, pencapaian target pendapatan yang kurang efektif, serta pengelolaan belanja yang belum efisien, yang mencerminkan kelemahan dalam perencanaan, pengawasan, dan strategi pengelolaan keuangan. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dengan memperkuat kualitas kinerja perangkat daerah, sistem pengelolaan pendapatan, dan proses pemungutan pajak serta retribusi, sekaligus menggali, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi Kota Makassar agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat diminimalisir dan kemandirian fiskal tercapai.

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup karena hanya berfokus pada analisis rasio kontribusi, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan tanpa menggabungkan variabel atau metode analisis lain yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif, serta hanya menggunakan data laporan realisasi anggaran dalam periode tertentu sehingga temuan yang diperoleh belum mencerminkan dinamika kinerja keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dengan memperluas indikator dan cakupan rasio keuangan, menggunakan periode data yang lebih panjang, menambahkan metode analisis lain, serta memperbanyak jumlah observasi dengan membandingkan kinerja keuangan beberapa daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas, bervariasi, dan komprehensif.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim & Muhammad Iqbal. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (4th ed.). STIM YKPN.

Amin, A., & Shah, A. (2019). Intergovernmental transfers and fiscal autonomy in local governments. *Regional Studies*.

Darmadi, D. (2021). *Administrasi Keuangan Daerah*. Empatdua Media.

Devas, N., & Grant, U. (2003). Local government decision-making—Citizen participation and local accountability: Some evidence from Kenya and Uganda. *Public Administration and Development*, *23(4)*, *307*.

Faguet, J.-P., & Sánchez, F. (n.d.). Decentralization, accountability, and local public finance. *World Development.*

Hartato. (2022). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Mohamad Mahsun (ed.)). UII Press.

Ingram, R. W., & K. (2016). Local government financial performance and fiscal accountability. *Public Budgeting & Finance.*

Iskandar, A. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, *7*(1), 1–25.

Krebs, T., & Wyrwich, M. (2020). No Title. *Fiscal Decentralization and Public Sector Performance: Evidence from Local Governments*.

Liu, Y., & Zhang, X. (2017). Fiscal decentralization and local government efficiency. *International Review of Administrative Sciences*.

Lutfi, M., & Hamris, S. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Pada Laporan Keuangan (2016-2022). *Jurnal Studi Ekonomi Dan Manajemen Terapan*, *1*(2), 1–17.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Martinez-Vazquez, J., & Timofeev, A. (2018). Decentralization and regional fiscal capacity. *Regional Studies*.

Mikesell, J. L. (2014). Fiscal administration and local government financial performance. *Public Budgeting & Finance*, *34(3)*, *1–1*.

Minassian, T. (2010). Fiscal federalism in theory and practice. *International Monetary Fund Working Paper*, *1–28*.

Muhammad Amin, Wahyunadi, B. (2024). *Membangun Kapasitas Fiskal Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat*. Deepublish.

Muhammad Ismail Kahfi, A. S. P. (2023). *Kinerja Keuangan Sektor Publik*. UII Press.

Nasir, A. R. (2023). *Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia* (K. Azan (ed.); Pertama). Dotplus Publisher.

Ningrat, R. R. P. (2025). Efektivitas Realisasi Anggaran Publik di Kota Makassar: Kajian Kritis Manajemen Keuangan Daerah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(2), 392–398. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.516

Nurkamto, J. (2018). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. In *35*. Rajawali Pers.

Oates, W. E. (2010). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, *37(3)*, *112*.

R. Bahl,., & Bird, R. (2003). Subnational taxes in developing countries: The way forward. *Public Budgeting & Finance*, *28(4)*, *1–2*.

R, M., Anwar, A., & Syachbrani, W. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Mendukung Kinerja Pada Bawaslu Kota Makassar. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, *2*(4), 482–491. https://doi.org/10.61579/future.v2i4.163

Rasimah. (2021). *Ekonomi Keuangan Daerah: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.

Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2022). Fiscal decentralization and territorial inequality. *Journal of Regional Science*.

Sadat, A. (2022). *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Deepublish.

Sahdan, R., Hormati, A., & Irham, J. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, *3*(2), 117–126. https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i2.6445

Salasa, F., Anwar, A., & Nuraisyiah. (2024).

Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Samsat Tana Toraja. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, *2*(4), 514–521. https://doi.org/10.61579/future.v2i4.184

Sari, Dewi R, H. (2020). *Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Era Digital*. Graha Ilmu.

Setyadi, B. (2019). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerinntahan*. Prenada Media.

Shah, A. (2010). Local budgeting and financial management. *World Bank Policy Research Working Paper*, *1–40.*

Sholehah, N. L. H. (2023). *Manajemen Keuangan: Prinsip Dasar dan Penerapannya* (P. I. Muh. Sabir M (ed.); Edisi Pert). Cahaya Arsh Publisher.

Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, *35(2)*, *97–*.